

Peran Kepala Sekolah dan Wali Kelas dalam Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling di SMP Negeri 10 Sumedang

Silmi Hafiyani¹, Uman Suherman²

Program Studi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan,
Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia¹

Program Studi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan,
Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia²

E-mail: silmihafiyani17@upi.edu¹, umans@upi.edu²

Correspondent Author: Silmi Hafiyani, silmihafiyani17@upi.edu

Doi: [10.31316/gcouns.v8i3.6046](https://doi.org/10.31316/gcouns.v8i3.6046)

Abstrak

Pelaksanaan bimbingan dan konseling yang efektif membutuhkan komitmen dalam bentuk kolaborasi dari berbagai pihak dalam memfasilitasi kebutuhan siswa. Tujuan penelitian ini adalah terwujudnya peran kepala sekolah dan wali kelas yang memfasilitasi pengembangan potensi dan kebutuhan siswa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif menggunakan instrument pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Subjek penelitian adalah guru bimbingan dan konseling/konselor sekolah, kepala sekolah, dan wali kelas di SMP Negeri 10 Sumedang. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Uji validitas data menggunakan sumber triangulasi sumbar. Hasil penelitian ini mengungkap bahwa pelaksanaan bimbingan dan konseling sudah berjalan cukup optimal, walaupun memiliki keterbatasan dalam jumlah personel guru bimbingan dan konseling yang lebih sedikit daripada jumlah siswa secara keseluruhan. Kesimpulan penelitian ini menyatakan keberhasilan pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah sangat bergantung pada sinergitas dan kerja sama semua personel sekolah untuk mencapai tujuan bimbingan dan konseling dengan optimal.

Kata kunci: pelaksanaan bimbingan dan konseling, kolaborasi, kepala sekolah, wali kelas

Abstract

The successful implementation of guidance and counseling requires commitment in the form of collaboration from various parties in facilitating students' needs. The purpose of this research is to realize the role of principals and homeroom teachers who facilitate the development of students' potential and needs. This study used a qualitative approach with descriptive methods using data collection instruments of interviews, observation, and documentation. The research subjects were a guidance and counseling teachers/school counselors, a headmaster, and homeroom teachers at SMP Negeri 10 Sumedang. Data analysis techniques used data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The data validity test used source triangulation. The results of this study indicate that the implementation of guidance and counseling has been optimal, although it has limitations in the number of guidance and counseling teacher personnel who are fewer than the number of students as a whole. The conclusion of this study states that the successful implementation of guidance and counseling in schools is highly dependent on the synergy and collaboration of all school personnel to achieve optimal guidance and counseling goals.

Keywords: *guidance and counseling implementation, collaboration, headmaster, homeroom teacher*

Info Artikel

Diterima Maret 2024, disetujui Mei 2024, diterbitkan Agustus 2024



PENDAHULUAN

Bimbingan dan konseling memiliki peran penting dalam membantu siswa mencapai pengembangan potensi secara optimal dan pencapaian tugas perkembangan secara holistik sehingga diharapkan siswa mencapai kemandirian dan kesejahteraan pribadi. Sesuai dengan peranannya bimbingan dan konseling sebagai upaya strategi layanan untuk mengembangkan potensi siswa secara optimal maka pelayanan harus dikaitkan dengan pengembangan sumber daya manusia agar mampu menjawab tantangan kehidupan masa depan (Suherman, 2015). Dengan demikian, strategi dan upaya pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling hendaknya disesuaikan dengan fungsi serta visi misi pendidikan, karakteristik dan kebutuhan perkembangan siswa serta kondisi lingkungan siswa secara kultural.

Bimbingan dan konseling di sekolah tentu memerlukan manajemen dalam pelaksanaan agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah memberikan kontribusi pada tercapainya tujuan pendidikan melalui visi dan misi sekolah, memfasilitasi kebutuhan siswa melalui *need assessment*, dan standar kompetensi kemandirian untuk mewujudkan diri (*self-actuation*) dan pengembangan kapasitas (*capacity development*) tertuang dalam Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006. Orientasi pendekatan bimbingan dan konseling telah mengalami perubahan paradigma, yaitu bimbingan dan konseling sebelumnya berorientasi pada tradisional, pemecahan masalah, klinis, remedial, dan *teacher oriented* menjadi pendekatan yang berorientasi pada perkembangan dan sifatnya preventif (Lase, 2018). Oleh karena itu, implementasi bimbingan dan konseling berorientasi pada upaya memfasilitasi pengembangan potensi siswa meliputi aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir sebagai makhluk yang berdimensi *biopsikososiospiritual*, yaitu biologis, psikologis, sosial, dan spiritual (Yusuf & Nurihsan, 2016).

Pelaksanaan bimbingan dan konseling memanfaatkan sumber daya yang ada di sekolah. Bimbingan dan konseling berada di bawah tanggung jawab kepala sekolah dan staf sekolah, sementara koordinator bimbingan dan konseling bertanggung jawab dalam menyelenggarakan program bimbingan dan konseling secara operasional (Suherman, 2015). Dengan demikian, pelaksanaan bimbingan dan konseling tidak hanya melibatkan guru bimbingan dan konseling atau konselor saja, melainkan seluruh personel sekolah, termasuk orang tua siswa dalam mencapai tujuan yang telah dirumuskan dalam program bimbingan dan konseling. Pelaksanaan menjadi sebuah penggerak yang berhubungan langsung dengan kegiatan siswa dalam melakukan pengembangan potensi diri dan pencapaian tugas perkembangan. Dalam hal ini, tentunya guru bimbingan dan konseling perlu melakukan koordinasi dengan berbagai personel sekolah termasuk kepala sekolah, wali kelas, dan orang tua siswa untuk dapat melaksanakan rancangan program sesuai dengan kebutuhan siswa (Rahmadani, Neviyarni, & Firman, 2021).

Berdasarkan kajian teoretik Perusse et.al (2004) menyatakan persepsi kepala sekolah mengenai peran dan tanggung jawab guru bimbingan dan konseling seringkali tidak sesuai dengan standar dan ketentuan organisasi profesi. Studi empiris berdasarkan wawancara di lapangan menunjukkan pelaksanaan bimbingan dan konseling belum berjalan dengan optimal. Ketidakefektifan pelaksanaan bimbingan dan konseling ditunjukkan karena kurangnya keterlibatan kepala sekolah dalam pengawasan pelaksanaan bimbingan dan konseling, peran wali kelas yang tidak optimal, seperti ketidakpekaan terhadap kebutuhan dan perkembangan potensi peserta didik. Fakta di lapangan menunjukkan intensitas kontak pribadi harian guru bimbingan dan konseling terhadap kebutuhan dan perkembangan siswa terbatas. Oleh karena itu, peran wali kelas terhadap kepekaan kebutuhan siswa yang memerlukan layanan bimbingan dan konseling akan sangat bermanfaat dalam pencegahan permasalahan siswa (Ferdiansyah, 2023). Hal ini memiliki makna bahwa paradigma pelaksanaan bimbingan dan konseling memerlukan terjalinnya kerja sama yang mampu mendorong wali kelas untuk lebih aktif mengidentifikasi dan memahami kebutuhan serta permasalahan siswa pada kelas yang dibina.

Hasil penelitian Hadian dan Yulianti (2011) menunjukkan bahwa kepemimpinan kepala sekolah berpengaruh positif terhadap kinerja guru pembimbing sebesar 18,3% (Hadian & Yulianti, 2011). Hasil penelitian Nasrun tahun 2016 di SMA Negeri kota Medan menunjukkan



bahwa adanya pengaruh langsung kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru (Nasrun, 2016). Penelitian Kurniawan (2015) pada SMK Negeri 1 Pati menunjukkan bahwa kepemimpinan kepala sekolah berpengaruh signifikan terhadap kinerja guru. Berbagai temuan ini menunjukkan bahwa kepemimpinan kepala sekolah memiliki urgensi penting dalam tercapainya pendidikan yang bermutu.

Aspek utama dalam manajemen bimbingan dan konseling tidak terlepas dari peran kepemimpinan kepala sekolah dan seluruh personel sekolah dalam melaksanakan layanan bimbingan dan konseling di sekolah (Hasmidar, 2010; Yohanes, 2021). Aspek kunci dari kepemimpinan kolaboratif sekolah adalah hubungan di antara para profesional sekolah. Pelaksanaan bimbingan dan konseling memiliki urgensi dalam peningkatan mutu pendidikan tidak hanya pada layanan preventif maupun kuratif saja, tetapi bagaimana pelaksanaan bimbingan dan konseling dapat membangun manusia seutuhnya dari berbagai aspek potensi diri. Oleh karena itu, perlunya keterlibatan kepala sekolah dan wali kelas guna membantu guru bimbingan dan konseling atau konselor di sekolah untuk memberikan pelayanan bimbingan dan konseling yang terstruktur dan terarah demi tercapainya tujuan yang diharapkan. Kepala sekolah dan konselor membangun respon secara kooperatif terhadap dinamika pengembangan potensi dan kemandirian siswa. Dalam menciptakan efektivitas kolaborasi, kepala sekolah perlu memahami peran dan fungsi sebagai pemimpin sekolah dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling. Namun keterlibatan kepala sekolah sebagai pimpinan masih terfokus pada pembelajaran dan manajemen sekolah (Tygret, et.al., 2020). Sementara peran wali kelas diharapkan dapat menunjang kepentingan efektivitas dan efisiensi layanan bimbingan dan konseling di sekolah (Ferdiansyah, 2023)

Keseluruhan aktivitas pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling seorang guru bimbingan dan konseling perlu memperhatikan dan mendayagunakan sumber-sumber seperti manusia, material, alat dan fasilitas, waktu, keuangan, dan pemasaran. Sumber daya utama dalam proses pelayanan bimbingan dan konseling adalah *manusia* sebagai pengelola, pelaksana, maupun sasaran layanan bantuan. Sebagai pengelola dan pelaksanaan, individu yang terlibat dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling adalah orang yang memiliki keahlian dan kewenangan secara profesional. *Materi* layanan bimbingan dan konseling diberikan berdasarkan kebutuhan dan pengembangan potensi siswa. *Alat dan fasilitas* digunakan untuk mempermudah pencapaian tujuan secara efektif dan efisien dalam keseluruhan layanan bimbingan dan konseling. *Waktu* pelaksanaan bimbingan dan konseling merujuk pada alokasi pendistribusian waktu yang tercantum dalam Panduan Operasional Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling (2016). *Keuangan* menjadi salah satu faktor pendorong terlaksananya kegiatan, tetapi perlu disadari bahwa sebelum tentu banyak yang modal yang dimiliki sudah memastikan pencapaian tujuan secara efektif. *Pemasaran (sosialisasi)* program bimbingan dan konseling dilakukan kepada seluruh personel sekolah termasuk orang tua (Suherman, 2015). Layanan informasi mengenai kebutuhan dan pengembangan potensi siswa dilakukan pada siswa di setiap awal semester. Secara umum tujuan bimbingan dan konseling tertuang dalam Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 tentang bimbingan dan konseling di satuan pendidikan yaitu membantu siswa/konseli mencapai perkembangan optimal dan kemandirian secara utuh dalam aspek pribadi, belajar, sosial, dan karir. Dalam upaya mewujudkan tujuan pelaksanaan tersebut, diperlukan keterlibatan personel sekolah untuk bersama-sama melakukan kolaborasi dan koordinasi terhadap kebutuhan dan ketercapaian tugas perkembangan siswa. Aspek-aspek dalam setiap tahapan pelaksanaan bimbingan dan konseling harus jelas dan terstruktur, meliputi (1) sasaran yang ingin dicapai, (2) kegiatan yang akan dilakukan, (3) siapa pelaksana dan penanggung jawabnya, (4) kapan waktu pelaksanaannya, serta (5) sarana atau prasarana dan dana yang diperlukan (Suherman, 2023).

Dengan demikian, tujuan artikel *mini research* ini, yaitu keterlibatan peran kepala sekolah dan wali kelas yang tidak hanya berperan sebagai supervisor atau pengawasan, melainkan dapat menciptakan lingkungan yang mendukung implementasi bimbingan dan konseling yang efektif di SMP Negeri 10 Sumedang dalam mendorong kesejahteraan siswa. Artikel ini memberikan manfaat terutama bagi konselor sekolah dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling yang



tentunya memerlukan keterlibatan dari personel sekolah terutama kepala sekolah dan wali kelas untuk tercapainya tujuan bimbingan dan konseling yang menjadi wadah dalam memfasilitasi kebutuhan siswa, pengembangan potensi, dan pengentasan masalah siswa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 10 Sumedang pada tanggal 28 Februari 2024 – 1 Maret 2024. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggambarkan secara deskriptif bagaimana peran kepala sekolah dan wali kelas dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling di SMP Negeri 10 Sumedang. Subjek penelitian adalah guru bimbingan dan konseling, kepala sekolah, dan wali kelas sebagai pelaksana bimbingan dan konseling di SMP Negeri 10 Sumedang. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan instrument penelitian pada proses pengumpulan data di lapangan adalah pedoman wawancara, pedoman observasi, dan dokumentasi. Dalam penelitian kualitatif data dikumpulkan berbentuk naratif, deskriptif, dan transkrip (Moleong, 2013). Adapun dalam melakukan analisis data, peneliti menggunakan analisis data model Miles, Huberman, dan Saldana (2014), yaitu jika kegiatan pada analisis data kualitatif dilangsungkan dengan interaktif serta dilakukan berkesinambungan hingga selesai sampai data tersebut jemu. Dengan demikian, kegiatan dalam analisis data model Miles, Huberman, dan Saldana melalui tahapan mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan.

Pada saat peneliti melangsungkan observasi di lokasi penelitian, diperoleh sebuah data mengenai subjek penelitian yang bersifat kompleks dan belum tersusun, sehingga peneliti harus menyusun data tersebut dan mereduksinya. Setelah melakukan reduksi data, tahapan selanjutnya adalah menyajikan data dengan menggunakan teks naratif. Selanjutnya, tahapan terakhir dari analisis data yaitu penarikan kesimpulan. Dalam penelitian kualitatif, simpulan awal yaitu simpulan temporer dan akan berubah apabila tidak diperoleh fakta yang mendukung dalam pengumpulan data selanjutnya. Namun, apabila simpulan awal didasari dengan bukti dan fakta yang valid serta sesuai, dengan demikian simpulan akhir tersebut simpulan yang dapat dipercaya (Sugiyono, 2016). Uji keabsahan data menggunakan triangulasi, yaitu melakukan pengecekan ulang (*cross check*) data yang diperoleh dari lapangan dengan melihat fenomena yang tampak ditanyakan dan dikembangkan melalui wawancara mendalam pada subjek penelitian (informan). Dalam penelitian ini, prosedur analisis data yaitu bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah milih menjadi satuan yang dapat menemukan informasi penting dan informasi yang perlu dipelajari, serta memutuskan informasi atau data yang dapat diceritakan kepada orang lain (Moleong, 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian melalui wawancara dengan guru bimbingan dan konseling, kepala sekolah, dan wali kelas sebagai berikut. Berdasarkan hasil wawancara pertama yang dilakukan kepada salah seorang guru bimbingan dan konseling, yaitu Silvia Agustina, S.Pd., terkait dengan pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah, yaitu diperoleh data sebagai berikut.

“Pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah ini sudah berjalan optimal, namun dikarenakan kekurangan sumber daya dalam personel guru bimbingan dan konseling, sehingga untuk pelaksanaan bimbingan dan konseling lebih berfokus pada layanan kuratif dan urgent berkaitan dengan permasalahan siswa yang harus segera diselesaikan. Untuk pelaksanaan bimbingan menggunakan jam layanan ketika terdapat guru mata pelajaran yang berhalangan hadir, sehingga kelas diisi oleh layanan bimbingan dan konseling atas seizin guru mata pelajaran yang bersangkutan. Sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan bimbingan dan konseling sejauh ini belum optimal sesuai dengan POP BK, dikarenakan tidak ada ruang khusus konseling individu maupun kelompok, sehingga berdampak pada privasi siswa yang kurang terjaga kerahasiaannya.”



Berdasarkan data yang diperoleh layanan bimbingan dan konseling sudah cukup berjalan optimal, meskipun masih terdapat banyak tantangan yang perlu diatasi dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling, terutama terkait dengan sarana, jumlah guru BK, dan penyediaan layanan yang holistik sesuai dengan kebutuhan siswa. Upaya untuk terus meningkatkan kualitas layanan BK dan menyediakan sarana yang memadai harus terus dilakukan. Pelaksanaan bimbingan dan konseling dilakukan sudah sesuai Standar Operasional Prosedur dalam penanganan siswa bermasalah, meskipun demikian beberapa kasus penanganan siswa disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan, karena keterbatasan jumlah personel guru BK. Sejalan dengan hal tersebut, keterbatasan waktu dan jumlah personel guru bimbingan dan konseling menjadi kendala utama dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling, sehingga guru BK harus mampu mengatur waktu dengan optimal dan berupaya untuk berkolaborasi dengan seluruh komponen sekolah, terutama wali kelas agar kebutuhan siswa dapat terfasilitasi dengan baik (Rosmawati & Donal, 2018).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada kepala sekolah SMPN 10 Sumedang, yaitu Dra.Irna Karlina Yuniar, M.M.Pd. mengenai keterlibatan peran kepala sekolah dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling, yaitu diperoleh data sebagai berikut.

“Peran kepala sekolah dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling bukan hanya sekedar pemantauan melalui supervisi di kelas saja, tetapi seluruh kegiatan pelaksanaan bimbingan dan konseling yang telah dilaksanakan dilaporkan setiap rapat dinas, terutama dalam penanganan siswa yang bermasalah. Disamping itu, ketika guru bimbingan dan konseling mengundang orang tua untuk melakukan kolaborasi, saya sebagai pimpinan sekolah selalu menanyakan permasalahannya, tindakan yang telah dilakukan, sejauh mana upaya kolaborasi dengan wali kelas untuk meninjau perkembangan siswa tersebut sebelum mengundang orang tua ke sekolah. Karena di sekolah ini hanya terdapat satu orang guru BK dengan jumlah siswa hampir 500 orang, sehingga penanganan difokuskan pada siswa yang bermasalah, namun tidak menutup kemungkinan untuk guru BK masuk ke kelas yang membutuhkan bantuan berdasarkan laporan dari wali kelas, siswa, maupun guru mata pelajaran.”

Sejalan dengan hasil penelitian Lowery, et al (2018), menemukan bahwa keterlibatan kepala sekolah secara optimal dapat membantu meningkatkan efektivitas layanan BK di sekolah. Keterlibatan kepala sekolah di SMPN 10 Sumedang menunjukkan bahwa kepala sekolah sangat berperan dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling melalui kolaborasi dan konsultasi. Adanya komunikasi yang terjalin baik, keterlibatan kepala sekolah memberikan dukungan dan memastikan pelaksanaan bimbingan dan konseling berjalan dengan optimal. Kepala sekolah merupakan penanggung jawab seluruh kegiatan pendidikan di sekolah, termasuk pelaksanaan bimbingan dan konseling. Kepala sekolah memiliki tugas dan peran dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling yaitu sebagai berikut. penentuan staff personal bimbingan dan konseling; penyusunan program bimbingan dan konseling; sosialisasi dan penetapan program bimbingan dan konseling kepada civitas sekolah sebagai bagian dari program sekolah; penyediaan kelengkapan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam kegiatan bimbingan dan konseling; pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan bimbingan dan konseling; pengembangan kerjasama dengan instansi atau profesi lain yang berkaitan dengan kebutuhan siswa; dan pengembangan program bimbingan dan konseling termasuk pembinaan dan pelatihan personil bimbingan dan konseling melalui kegiatan workshop maupun pelatihan pengembangan diri (Suherman, 2015). Menurut Abubakar (2010), kepala sekolah mempunyai tugas, seperti 1) membuat rencana program sekolah secara menyeluruh termasuk bimbingan dan konseling; 2) mendelegasikan tanggung jawab tertentu dalam bimbingan dan konseling; 3) mengawasi pelaksanaan program; 4) melengkapi dan menyediakan kebutuhan fasilitas bimbingan dan konseling; 5) mempertanggung jawabkan program tersebut baik dalam sekolah maupun di luar (masyarakat); 6) mengadakan hubungan dengan lembaga-lembaga diluar sekolah dalam rangka



kerja sama pelaksanaan bimbingan dan konseling; 7) mengkoordinasikan kegiatan bimbingan dan konseling dengan kegiatan-kegiatan lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada wali kelas SMPN 10 Sumedang mengenai keterlibatan peran wali kelas dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling, yaitu diperoleh data sebagai berikut.

“Peran wali kelas dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling yaitu adanya kolaborasi dan konsultasi mengenai permasalahan siswa, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan akademik dalam belajar, seperti kehadiran siswa di kelas, sikap siswa selama proses pembelajaran, dan pemantauan perkembangan siswa setelah ditangani oleh guru bimbingan dan konseling. Untuk prosedur penanganan siswa dilakukan melalui identifikasi wali kelas, diselesaikan terlebih dahulu oleh wali kelas, namun apabila tidak kunjung berhasil maka wali kelas berkonsultasi dan bekerja sama dengan guru BK.”

Wali kelas merupakan personel sekolah yang menjadi mitra kerja utama guru BK atau konselor dalam aktivitas bimbingan dan konseling di sekolah (Nurihsan, 2007). Wali kelas sebagai mitra utama memiliki peran yang penting dalam memfasilitasi kebutuhan siswa yang memerlukan layanan bimbingan dan konseling. Adapun peran penting wali kelas dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling yaitu (1) menyediakan informasi tentang informasi siswa, mulai dari karakteristik, latar belakang keluarga, data pribadi siswa, hingga pada kebutuhan serta pengembangan potensi di kelas; (2) melibatkan diri dalam mensosialisasikan pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah, mencakup tujuan, fungsi, dan peran bimbingan dan konseling di sekolah, serta mekanisme penanganan permasalahan siswa; (3) memantau perkembangan dan kemajuan siswa di kelasnya, terutama berkaitan dengan prestasi akademik, kepribadian, dan sikap siswa di kelas; (4) melakukan identifikasi terhadap siswa yang membutuhkan layanan responsif berkenaan dengan permasalahan yang dihadapinya; (5) melakukan kunjungan rumah untuk mengenal siswa secara lebih dalam; dan (6) terlibat dalam kegiatan konferensi kasus (Suherman, 2015). Keterlibatan wali kelas dalam kolaborasi mengenai kebutuhan dan permasalahan di kelasnya bervariasi di setiap sekolah. Fakta di lapangan menunjukkan peran wali kelas dalam upaya kolaborasi mengenai kebutuhan dan permasalahan siswa di kelasnya hanya pada permasalahan siswa di kelas, wali kelas tidak mencari tahu secara mendalam karakteristik siswa, latar belakang, maupun potensi yang dimiliki. Dengan demikian, keterlibatan wali kelas dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling hanya pada area kuratif atau permasalahan yang harus diselesaikan dengan segera. Peran wali kelas di lapangan tidak selalu berkolaborasi dengan guru BK secara konsisten. Namun secara penanganan masalah yang dialih tangankan kepada guru BK, keterlibatan wali kelas dalam memberikan *feedback* setelah pelaksanaan bimbingan maupun konseli kepada siswa di kelasnya menunjukkan peran aktif wali kelas untuk memantau perkembangan siswa dan menentukan tindak lanjut yang tepat.

Hasil wawancara yang dilakukan terhadap guru BK berkaitan dengan hambatan pelaksanaan bimbingan dan konseling di SMPN 10 Sumedang, diperoleh data yakni sebagai berikut. (1) keterbatasan jumlah guru bimbingan dan konseling sehingga pelaksanaan bimbingan dan konseling tidak sepenuhnya optimal sesuai dengan kebutuhan siswa; (2) meskipun kepala sekolah telah memahami fungsi tugas dan peran guru bimbingan dan konseling, namun masih terdapat persepsi bahwa penanganan siswa bermasalah, guru bimbingan dan konseling harus bertindak menghukum siswa yang melakukan pelanggaran. Sehingga diperlukan pemahaman dan koordinasi semua *stakeholder*, terutama kepala sekolah sebagai penanggung jawab pelaksanaan bimbingan dan konseling, yang secara tegas menguatkan peran, tugas, dan fungsi guru BK di sekolah. Sejalan dengan hasil penelitian McConnel, Geesa, Mayes, & Elam (2020) yang menyatakan hambatan utama dalam kolaborasi dengan personel sekolah adalah perbedaan pandangan mengenai berbagai isu dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling, seperti tugas dan peran konselor, etika dan penghargaan satu sama lain. Menurut Yohanes (2021), tugas dan peran yang dibebankan kepada guru bimbingan dan konseling, seperti 1) menjadi petugas disiplin sekolah; 2) membantu tugas administrasi kepala sekolah; 3) melakukan administrasi tes, seperti



menginput data dan, 4) mengawasi siswa makan siang pada jam istirahat. Akibatnya guru bimbingan dan konseling tidak dapat secara optimal menangani masalah-masalah socioemosional maupun akademik yang dialami oleh siswa (ASCA, 2012).

Guru bimbingan dan konseling atau konselor sekolah memiliki proporsi peran kepemimpinan yang tinggi dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling dalam mencapai visi dan misi sekolah. Namun seringkali kepala sekolah kurang memahami peran konselor yang tidak hanya menangani permasalahan kuratif saja, melainkan pencegahan preventif yang disesuaikan dengan standar yang ditetapkan. Sehingga pelaksanaan bimbingan dan konseling kurang memperhatikan komponen, terutama sarana dan prasarana yang memadai (Geesa, et.al., 2020).

Pentingnya kerja sama antara guru bimbingan dan konseling atau konselor sekolah dan kepala sekolah dalam sinergitas dalam menciptakan suasana lingkungan belajar yang mampu meningkatkan kesejahteraan siswa (Janson, et.al, 2008). Kepala sekolah dan konselor perlu membangun hubungan kerja yang efektif berdasarkan tujuan yang berpusat pada kebutuhan dan perkembangan siswa, sehingga diperlukan komunikasi berkelanjutan (Geesa, 2020). Tidak hanya pada sosialisasi program, namun berkelanjutan pada pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling secara berkala, dan evaluasi bimbingan dan konseling secara menyeluruh. Sudut pandang kolaborasi menjadi faktor penting pada konteks kolaborasi interpersonal dalam hubungannya dengan konten inisiatif peningkatan sekolah yang spesifik (Janson, et.al., 2008). Proses kolaborasi yang diperlukan melibatkan interaksi aktif dan berkelanjutan yang berfokus pada kerja sama dalam keefektifan pelaksanaan bimbingan dan konseling serta kolaborasi hendaknya membawa kontribusi pada pengetahuan siswa secara lebih mendalam (West & Idol, 1993). Peran kepala sekolah dan konselor perlu menjalin kolaborasi yang optimal, dimana kedua peran tersebut saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain dalam mencapai keberhasilan visi dan misi sekolah serta kesejahteraan siswa. Kepala sekolah yang bertugas sebagai penanggung jawab sekolah berperan dalam mengarahkan dan mengelola aspek manajerial secara menyeluruh, sementara konselor sekolah berperan dalam melaksanakan bimbingan dan konseling yang berfokus pada kebutuhan siswa (McConnel, Geesa, Mayes, & Elam, 2020).

KESIMPULAN

Kolaborasi yang optimal antara konselor sekolah dan kepala sekolah merupakan kunci kesuksesan pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah. Kepala sekolah dan wali kelas memiliki peran dan kontribusi masing-masing dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah. Oleh karena itu, penting bagi keduanya untuk saling memahami peran dan tanggung jawab masing-masing, serta bekerja sama dalam merancang dan melaksanakan program-program yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Keberhasilan pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah sangat bergantung pada sinergitas dan kerja sama semua personel sekolah untuk mencapai tujuan bimbingan dan konseling dengan optimal. Guru bimbingan dan konseling dapat memanfaatkan teknologi informasi dalam pelaksanaan layanan dasar dalam memenuhi kebutuhan siswa dan sebagai upaya preventif pencegahan masalah. Guru bimbingan dan konseling serta wali kelas bekerja secara kooperatif dalam mengeksplorasi kebutuhan dan permasalahan siswa di kelas secara komprehensif melalui data pribadi siswa dan kolaborasi intensif dengan orang tua siswa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, I. (2010). Peran Kepala Sekolah Sebagai Motivator dalam Peningkatan Profesionalisme Guru di MTs Negeri Yogyakarta II. Skripsi. Yogyakarta.
- American School Counselor Association. (2012). ASCA National Model: A Framework for School Counseling Programs. Executive summary
- Ferdiansyah, M. (2023). Peran Wali Kelas dalam Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling di Sekolah. Kota Solok, Sumatera Barat: PT Mafy Media Literasi Indonesia.
- Geesa, R.L., Mayes, R, D., Lowey K, P., Quick M, M., Boyland, L, G., Kim, J., Elam., N, P., & McDonald, K, M. (2020). Increasing Partnership in Educational Leadership and School Counseling: A Framework for Collaborative School Principal and School Counselor



- Preparation and Support. *International Journal of Leadership in Education*, 25(3), pp. 1-24.
Doi: <https://doi.org/10.1080/13603124.2020.1787525>
- Hadian, D. & Yulianti, I. (2011). Pengaruh Kompetensi Guru Pembimbing, Iklim Organisasi, Dan Kepemimpinan Kepala Sekolah Terhadap Kinerja Guru Pembimbing Pada SMA Se-Kota Cimahi. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Entrepreneurship*, 5 (2), pp. 63-73.
- Hasmidar. (2010). Peran Kepala Sekolah dalam Program Bimbingan dan Konseling di SMP 20 Pekanbaru. Skripsi pada Program Studi Kependidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru.
- Kurniawan, L. (2015). Pengembangan Program Layanan Bimbingan dan Konseling Komprehensif di SMA. *Jurnal Psikologi Pendidikan dan Konseling*. 1(1), pp.1-8. DOI: <https://doi.org/10.26858/jpkk.v1i1.1351>
- Lase, B.P. (2018). Posisi dan Urgensi Bimbingan dan Konseling dalam Praktik Pendidikan. *Jurnal Warta Edisi* 58. <https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/download/392/385>
- Lowey, K., Quick, M., Boyland, L., Geesa, R, L., & Mayes R, D. (2018). "It Wasn't Mentioned and should Have Been": Principals' Preparation to Support Comprehensive School Counseling. *Journal of Organizational & Educational Leadership*, 3(2), 1-30.
- McConnel, K.R., Geesa, R.L., Mayes, R.D., & Elam, N.P. (2020). Improving School Counselor Efficacy Through Principal-Counselor Collaboration: A Comprehensive Literature Review. *Mid-Western Educational Researcher*, 32(2), pp. 133-155.
- Miles, M.B., Huberman, A.M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Source Book Third Edition*. USA: Sage Publication.
- Moleong, L.J. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.
- Nasrun. (2016). Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah Terhadap Motivasi Kerja dan Kinerja Guru. *Jurnal Ilmu Pendidikan* 1 (2), pp. 63-69.
- Nurihsan, J. (2007). *Bimbingan dan Konseling dalam Berbagai Latar Kehidupan*. Bandung: Refika Aditama.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling pada Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. (2014). Jakarta: Kemdikbud.
- Perusse, R., Goodnough, G. E., Donegan, J., & Jones, C. (2004). Perceptions of school counselors and school principals about the National Standards for School Counseling Programs and the Transforming School Counseling Initiative. *Professional School Counseling*, 7, 152–161.
- Rosmawati & Donal. (2018). Implementation of Guidance and Counseling at schools. *Proceeding of the 2nd URICES*, pp. 77-87.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Suherman, U. (2015). *Manajemen Bimbingan dan Konseling*. Bandung: Rizqi Press.
- Suherman, U. (2023). *Bimbingan dan Konseling Komprehensif Berbasis Nilai-Nilai Al Qur'an*. Bandung: UPI Press.
- Tim POP BK SMP. (2016). *Panduan Operasional Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling SMP*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Tygret, J., Mendez, S., Arndt, A., Lovato, D., & Scott, M. (2020). The Need for Collaboration: Experiences and Perceptions of Preservice Principals and School Counselors. *The Journal of Counselor Preparation and Supervision*. 13(4). Retrieved from <https://repository.wcsu.edu/jcps/vol13/iss4/3>
- West, J.F. & Idol, L. (1993). The Counselor as Consultant in Collaborative School. *Journal of Counseling and Development*, 71 (6), pp. 678-683. DOI: <https://doi.org/10.1002/j.1556-6676.1993.tb02259.x>
- Yohanes, Y. (2021). Peran kepala Sekolah dalam Manajemen Bimbingan dan Konseling Untuk meningkatkan kinerja Konselor Sekolah. *Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana*.
- Yusuf, S. & Nurihsan, J. (2016). *Landasan Bimbingan dan Konseling*. Bandung: PT Rosda Karya.

